

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau

Asepma Hygi Prihastuti¹, Taufeni Taufik², dan Restu Agusti²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

²Dosen Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

Abstract *Progress an area can be shown by good economic growth, in which one of the factors that influence economic growth is investment, the indicators is capital expenditure issued by local governments. Capital expenditure is also affected by whether or not the financial performance. This study aimed to determine the influence of regional financial performance impact allocation of capital expenditure and economic growth. Data analysis methods using Path Analysis with Partial Least Square (PLS) Program. The result of this study shown that financial performance influenced allocation of capital expenditure, allocation of capital expenditure did not influenced economic growth, financial performance influenced economic growth directly, and economic growth did not influenced by financial performance indirectly.*

Keywords: *financial performance, allocation of capital expenditure, economic growth*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah mengalami perubahan bentuk pemerintahan yang tersentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, lalu UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules money should follow function*) merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Berdasarkan PP No 105 Tahun 2000 pasal 8, disebutkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pemerintah daerah sebagai pihak

yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio (Halim, 2013: L-2).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2013: L-5). Dan berdasarkan penelitian Sularso (2011) untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu: derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Todaro (2003: 92) dalam Sasana (2009) menyampaikan ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal disini erat hubungannya dengan investasi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal serta kinerja keuangan.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 1996: 33). PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: Pendekatan Produksi, Pendekatan Pengeluaran dan Pendekatan Pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, yang dihitung dengan rumus (Sukirno, 2007):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2013: L-5):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim (2013: L-6) rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio aktivitas (keserasian) ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio keserasian belanja pembangunan diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2013: L-8):

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Alokasi Belanja Modal

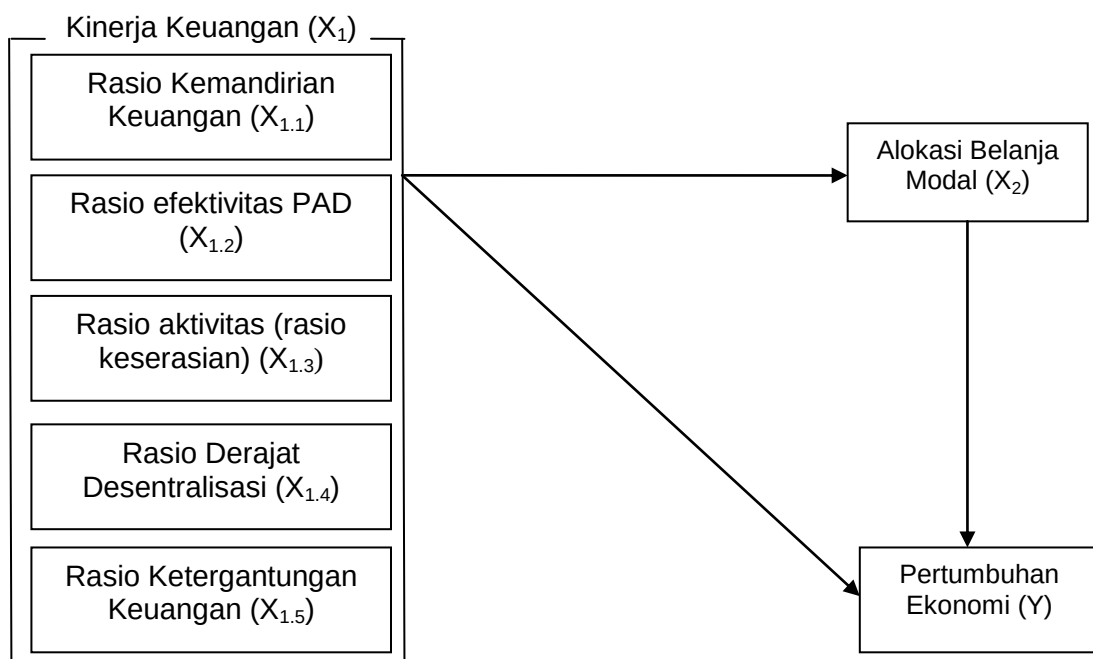
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53 (perubahan pertama dari Permendagri No. 13 Tahun 2006) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, indikator alokasi belanja modal diukur dengan rumus:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

KERANGKA PEMIKIRAN

Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kemajuan suatu daerah salah satunya dapat ditinjau dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai stimulus ekonomi. Berdasarkan penjelasan literatur diatas, maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian dikembangkan dalam sebuah model seperti dibawah ini.



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berikut hipotesis berdasarkan model penelitian dalam penelitian ini:

- H₁ : Kinerja keuangan yang tercermin dalam rasio kemandirian keuangan, efektivitas PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Riau.
- H₂ : Alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau.
- H₃ : Kinerja keuangan yang tercermin dalam rasio kemandirian keuangan, efektivitas PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan secara langsung

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau.

H₄ : Kinerja keuangan yang tercermin dalam rasio kemandirian keuangan, efektivitas PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan melalui alokasi belanja modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau.

METODOLOGI

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan secara sensus atas laporan realisasi APBD 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2009-2013, sehingga diperoleh data berjumlah 60. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Jln. Pattimura No. 12, Pekanbaru, Riau.

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Statistik deskriptif untuk menyajikan dan menganalisis data masing-masing variabel penelitian secara *univariate*. Sedangkan analisis Jalur digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian dengan bantuan Program *Partial Least Square* (PLS). Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009: 11) PLS adalah salah satu metoda statistik SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas. Pengujian dilakukan pada signifikansi 5% dengan ketentuan signifikan jika nilai t_{hitung} masing-masing $> 1,96$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Deskriptif masing-masing variabel dan sub variabel penelitian secara ringkas seperti pada Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan kondisi masing-masing variabel penelitian seperti berikut. Pertama; Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kotamadya Pekanbaru sebesar 10,57% dan terendah sebesar 6,37% di Kabupaten Rokan Hulu. Kedua; alokasi belanja modal tertinggi sebesar 55,23% pada Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan nilai terendah sebesar 9,59% pada Kabupaten Indragiri Hulu.

Ketiga; Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini yang tercermin pada 5 rasio keuangan dapat dijelaskan seperti berikut. Rasio Kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tertinggi sebesar 38,50% pada Kabupaten Siak, dan terendah sebesar 1,71% pada Kep. Meranti. Merujuk kategori dari Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002),

rata-rata rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar 8,04% tergolong sangat rendah (25%-50%). Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terbesar sebesar 210,20% pada Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan terendah sebesar 50,59% pada Kabupaten Indragiri Hulu. Merujuk kategori dari Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 rata-rata efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar 121,02% termasuk sangat efektif ($> 100\%$). Rasio aktivitas belanja pembangunan terbesar sebesar 73,46% pada Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan terkecil sebesar 13,93% pada Kabupaten Dumai. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terbesar sebesar 27,80% pada Kabupaten Siak, sedangkan terkecil sebesar 9,80% pada Kabupaten Kampar. Merujuk kategori menurut Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, Tahun 1991 rata-rata rasio derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar 6,86% dikategorikan sangat kurang ($> 50,00\%$). Rasio ketergantungan keuangan terbesar sebesar 98,08% pada Kabupaten Indragiri Hulu, dan terkecil sebesar 67,93% pada Kabupaten Dumai. Merujuk kategori menurut Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, Tahun 1991, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar 88,79% dikategorikan sangat tinggi Sangat Tinggi ($> 50,00\%$).

Tabel 1. Rata-rata Kinerja Keuangan, Alokasi Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun (2009-2013)

No	Kabupaten/Kota	Pertbh Eko	Alokasi Blj Mdl	Kinerja Keuangan				
				Rasio Kemd	Rasio Efektv	Rasio Aktv	Rasio Destr	Rasio KK
1	Kuantan Singingi	7,16	22,02	3,67	116,43	38,22	3,31	90,76
2	Indragiri Hulu	7,06	21,51	3,83	151,56	37,46	3,41	90,29
3	Indragiri Hilir	7,27	23,92	5,20	130,63	37,83	4,68	89,98
4	Pelalawan	7,13	26,11	5,11	135,62	52,14	4,50	88,46
5	Siak	7,25	38,90	21,16	134,07	44,49	16,81	81,76
6	Kampar	7,16	23,96	7,59	113,02	23,96	7,00	92,78
7	Rokan Hulu	7,14	27,51	3,87	133,24	31,76	3,67	94,67
8	Bengkalis	7,33	33,16	6,17	110,15	37,67	5,77	93,56
9	Rokan Hilir	7,53	47,94	4,89	58,37	57,30	4,56	93,50
10	Kep. Meranti	8,08	20,70	3,08	141,26	40,41	2,77	88,04
11	Pekanbaru	9,39	19,35	18,08	95,16	19,35	15,17	84,32
12	Dumai	8,51	21,84	13,85	132,69	28,15	10,66	77,33
Rata-rata		7,58	27,24	8,04	121,02	37,40	6,86	88,79
Minimum		6,37	9,59	1,71	50,59	13,93	9,80	67,93
Maksimum		10,57	55,23	38,50	210,20	73,46	27,80	98,08
Standar Deviasi		0,76	9,81	6,68	34,50	16,22	5,06	7,16

Sumber: Data yang Diolah

Analisis Jalur menggunakan Program Partial Least Square (PLS)

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model hubungan konstruk dengan indikatornya pada penelitian ini bersifat formatif karena seperti dinyatakan Jogiyanto dan Abdillah (2009:37) “jika indikator bersifat manifestasi maka konstruk tersebut merupakan konstruk reflektif. Sedangkan jika indikator bersifat mendefinisikan kosnstruk, maka konstruk tersebut merupakan konstruk formatif”. Lebih lanjut Jogiyanto dan Abdillah (2009: 100) menjelaskan pada konstruk formatif tidak dapat dilakukan uji reliabilitas karena masing-masing indikator dalam suatu variabel laten diasumsikan tidak saling berkorelasi (independen) sehingga nilai reliabilitas tidak dapat diukur. Oleh sebab itu pada penelitian ini tidak dilakukan uji reliabilitas. Sehubungan dengan uji validitas Jogiyanto dan Abdillah (2009: 100 dan 103) menyatakan pada rancangan penelitian dengan konstruk berbentuk formatif, uji validitas tercermin pada *outer weight* dari hasil analisis *boot strapping*. *Outer weight* hasil analisis *bootstrapping* seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data Penelitian

	Outer Weight				
	Original Sample	Sample Mean	Standard Error	T-Statistic	P Values
RA → Kinerja Keuangan	0,98	0,96	0,11	9,23	0,00
RD→Kinerja Keuangan	-2,21	-1,99	1,58	1,39	0,16
RE → Kinerja Keuangan	-0,06	-0,04	0,10	0,63	0,53
RK → Kinerja Keuangan	2,88	2,66	1,70	1,69	0,09
RKK → Kinerja Keuangan	1,05	1,04	0,22	4,78	0,00

Sumber: Data yang Diolah

Dari tabel di atas dapat dari 5 indikator Kinerja Keuangan, 2 indikatornya yaitu RA (Rasio Aktivitas) dan RKK (Rasio Ketergantungan Keuangan) memiliki nilai t_{hitung} masing-masing $> 1,96$ atau valid. Sedangkan 3 indikator lainnya yaitu RK (Rasio Kemandirian), RD (Rasio Derajat Desentralisasi) dan RA (Rasio Efektivitas) memiliki nilai t_{hitung} masing-masing $< 1,96$ atau tidak valid. Dalam kaitan ini Jogiyanto dan Abdillah (2009: 105) menyatakan bahwa:

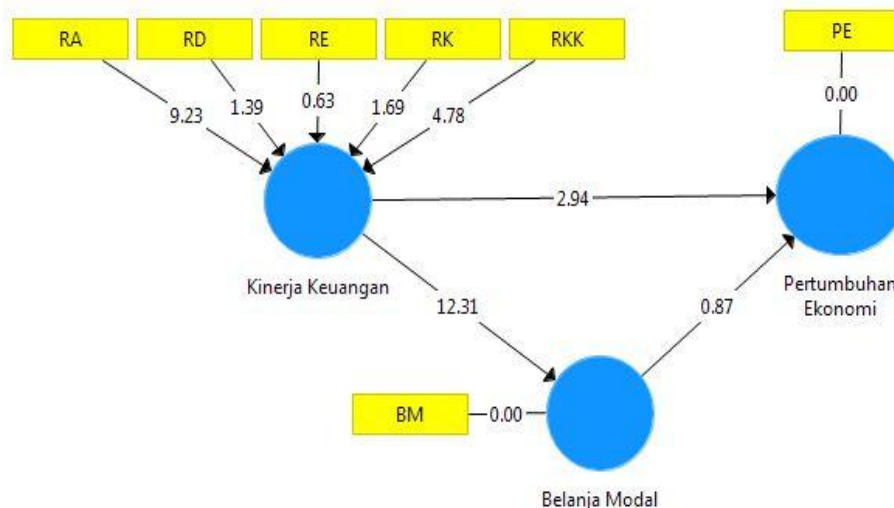
“Jika konstruk formatif tidak memenuhi kriteria uji validitas konstruk (yaitu terdapat salah satu atau lebih indikator yang tidak signifikan) maka konstruk formatif tersebut secara stastistikal tidak dapat diuji lebih lanjut dalam model struktural. Namun, jika menghapus konstruk formatif dalam suatu penelitian menyebabkan model penelitian kehilangan makna dan penelitian kehilangan dasar tujuan pengujian maka secara teoritikal konstruk formatif tersebut dapat diuji lebih lanjut dalam model struktural.”

Model struktural dalam penelitian ini ada 3 variabel, yaitu kinerja keuangan, alokasi belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam model struktural variabel alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung ditentukan oleh kinerja keuangannya. Oleh sebab itu jika variabel kinerja keuangan dihilangkan dari model akan menghilangkan makna penelitian ini. Oleh sebab itu dengan merujuk pernyataan

ahli tersebut di atas, maka uji model struktural dalam penelitian ini dapat dilanjutkan.

Hasil pengujian model struktural (*inner model*) dan hipotesis

Pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung dalam model struktural menggunakan program PLS dilakukan melalui analisis *bootstrapping* dengan ketentuan signifikan jika nilai t_{hitung} masing-masing $> 1,96$. Dari pengolahan data penelitian melalui analisis *bootstrapping*, diperoleh hasil seperti berikut.



Gambar 2. Hasil Uji Model Struktural

Secara rinci hasil pengujian model struktural tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. *Path Coefficients*

	Original Sample	Sample Mean	Standard Error	T-Statistic	P Values
Kinerja Keu → Alokasi Belanja Modal	0,77	0,77	0,06	12,31	0,00
Kinerja Keu → Pertumbuhan Ekonomi	-0,55	-0,60	0,19	2,94	0,00
Alokasi Belanja Modal → Pertumbuhan Ekonomi	0,14	0,17	0,16	0,87	0,39

Sumber: Data yang Diolah

Berdasarkan gambar dan tabel di atas dapat dijelaskan seperti berikut: *Hipotesis pertama; diterima*, karena diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 12,31 $> 1,96$. Berarti setiap perubahan kinerja keuangan Kab/Kota di Provinsi Riau secara langsung akan berdampak kepada perubahan alokasi belanja modal daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspita (2014) pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2012 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan Sularso (2011) pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2009 yang menyatakan alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan.

Hipotesis kedua; ditolak, karena nilai t_{hitung} sebesar $0,87 < 1,96$. Berarti dengan tingkat kepercayaan 95%, perubahan alokasi belanja modal kurang berdampak kepada perubahan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Ini sejalan dengan hasil penelitian Anasmen (2009) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2006, begitu juga hasil penelitian Yahya (2009) pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2004-2007, yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ketiga diterima, dengan nilai t_{hitung} sebesar $2,94 > 1,96$. Berarti setiap perubahan kinerja keuangan Kab/Kota di Provinsi Riau secara langsung akan berdampak pada perubahan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Ini sejalan dengan hasil penelitian Patikawa (2011) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta Kurniawan (2010) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Barat.

Hipotesis keempat ditolak, karena t_{hitung} sebesar $0,75 < 1,96$ seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. *Indirect Effect*

	Original Sample	Sample Mean	Standard Error	T-Statistic	P Values
Kinerja Keu → Pertum-buhan Ekonomi	0,10	0,12	0,14	0,75	0,45

Sumber: Data yang Diolah

Berarti secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) kinerja keuangan kurang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah itu (signifikan pada P Value 0,45 atau tingkat kepercayaan 55%).

Menurut Hair, dkk (1998) melalui analisis jalur akan ditemukan pengaruh langsung dan tidak langsung. Besarnya pengaruh langsung adalah “koefisien p”, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian antara “koefisien p” yang satu dengan “koefisien p lainnya” dalam satu arah. Disisi lain Hasan (1990) menjelaskan bahwa sumbangan efektif per variable adalah kuadrat dari pengaruh total (penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung). Merujuk pernyataan para ahli tersebut, besarnya sumbangan efektif variabel eksogen terhadap variabel endogenya adalah seperti pada Tabel 5.

Dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau secara langsung memberikan sumbangan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah itu sebesar 6,25%. Disisi lain tinggi/rendahnya alokasi belanja modal tersebut ditentukan oleh kinerja keuangannya sebesar 59,29%. Sedangkan Kinerja Keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung (yaitu melalui belanja modal) sebesar 19,36%.

Tabel 5. Sumbangan Efektif

	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Pengaruh total	Sumb Efektif
Alokasi Belanja Modal → Pertumbuhan ekonomi	0,14	-	0,25	6,25%
Kinerja Keuangan → Alokasi Belanja Modal	0,77	-	0,77	59,29%
Kinerja Keuangan → Pertumbuhan Ekonomi	-0,55	0,11	-0,44	19,36%

Sumber: Data Yang Diolah

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kinerja keuangan Kab/Kota di Provinsi secara langsung memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan sumbangan sebesar 59,29%, (2) Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) Kinerja keuangan secara langsung memiliki signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan sumbangan 30,25%, dan (4) Kinerja keuangan secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasar hasil penelitian disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006*. Tesis. Universitas Indonesia
- Bahl, R. W. 2000. *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillan-court, United Kingdom: Cambriadge University Press.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. 1998. *Multivariate Data Analysis (4th Ed.)*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Jogiyanto dan Willy Abdillah. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPFE Yogyakarta.
- Kurniawan, D. 2010. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dalam era Otonomi Daerah*. Tesis. Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Pertama Permendagri No 13 Tahun 2006).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Puspita, D. 2014. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal (studi empiris pada provinsi jawa barat tahun 2009-2012). Universitas gunadarma.

Sularso, H., dan Restianto, Y. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.